

ARTIKEL

**Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam
(PPMDI)**

Dosen Pengampu:

Dr. H. Surya Dwi Atmaja, MA.

Wahyu Nugroho, M.H



Oleh

Tasbi Khatu Daimah

NIM. 11901164

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
2022/2023**

Demokratisasi Pendidikan Dalam Pendidikan Islam

Abstrak

Pendidikan merupakan suatu proses penting yang harus dilalui oleh setiap manusia. Pendidikan menjadi penting karena diharapkan dapat melahirkan manusia yang mampu mengelola kehidupannya dengan baik dan dapat mengembangkan potensi dalam dirinya dengan baik. Demokratisasi pendidikan merupakan demokrasi yang diberikan kepada setiap individu dalam konteks pendidikan. tidak memandang ras, suku, agama, sudut pandang, warna kulit, dan lain sebagainya. Setiap manusia memiliki hak untuk mengembangkan kemampuan yang sudah ada sejak lahir. Demokrasi dalam sistem pendidikan Islam sangat mengedepankan kebebasan dalam mengembangkan diri. Penelitian ini dilakukan dengan maksud mengetahui bentuk demokratisasi di dalam pendidikan Islam. Penelitian ini dilakukan karena terdapat fenomena rendahnya jiwa demokrasi di lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang dilakukan peneliti yakni metode penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumen. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa demokrasi dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni tauhid, *syura*, *al-adlu*, amar makruf nahi munkar, *tawassuth*, serta kewajiban dan hak manusia dalam pengembangan ilmu.

Kata kunci: *Demokratisasi; Pendidikan; Pendidikan Islam*

Pendahuluan

Keeksistensian Pendidikan Islam masih perlu perhatian. Tidak jarang ditemukan lembaga pendidikan di dalamnya juga mencakup peserta didik yang kurang menunjukkan pengetahuan di bidang Islam. Secara umum, pendidikan dunia yang di canangkan oleh pemerintah lebih berbasis kepada sistem pengelompokan kelas dan dcondongkan pada kepentingan formalitas semata. (Fathorrahman, 2020).

Pendidikan sebagai alat yang dapat melahirkan masyarakat dengan kriteria atau tepatnya berkompentensi sehingga mampu menciptakan relasi untuk orang disekitarnya baik individu, kelompok ataupun masyarakat. (Rosyad & Ma'arif, 2020). Selain itu pendidikan juga menjadi tolak ukur dalam menciptakan perubahan. Sudut pandang dan sikap manusia akan dilatih melalui pendidikan yang ditempuhnya. Maka benar sebuah pernyataan dari Jhon Locke yang mengatakan bahwa "Manusia berada dalam kondisi bersih (kosong) saat dilahirkan, namun bisa diisi dengan pendidikan yang ditempuh kemudian dijadikannya

sebagai pengalaman dan dari disitulah pembentukan dimulai serta akan terjadi terus-menerus”. (Yu'timaalahuyatazaka, 2018).

Di wilayah yang terjangkau, stigma tentang sekolah yang lebih unggul masih terlihat eksis. Seperti dua hal yang berbeda antara hitam-putih, pendidikan dianggap ada yang elit dan tidak elit benar-benar nyata terjadi di kota-kota besar ini. Pemisahan antara pendidikan umum dan agama masih menjadi bulan-bulanan masyarakat. Tidak lain di wilayah yang sulit dijangkau, masyarakat yang mengalami krisis ekonomi dan sulitnya akses transportasi masih dibebankan dengan sulitnya jangkauan pendidikan. Masyarakat bisa mendapatkan pendidikan layaknya di kota-kota besar tampak seperti impian belaka. Apalagi bisa menempuh pendidikan lanjutan, sangat jauh dari realita yang ada.

Tan Malaka dalam tulisannya menuliskan pemerataan kesempatan pendidikan yakni “Jika pendidikan yang ada di sekolah di berikan sesuai dengan kondisi masyarakat dan alamnya, pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan realita yang ada, maka pengetahuan akan mudah terserap. Kalau pendidikan di berikan dengan bahasa dan sastra yang megah, berdasarkan kegiatan yang menimbulkan ketebalan segi ketabahan dan keimanan masyarakat, tidak pada dasar untuk menindas masyarakat, adanya kesempatan yang sama di setiap orang, maka pendidikan akan subur dan kokoh. (Fathorrahman, 2020).

Pendidikan harus berorientasi pada masyarakat. Pendidikan harus dibebaskan dari kebelungguan kekuasaan pemerintahan. Kalau hal tersebut dapat terlaksana maka demokratisasi pendidikan bisa terwujud. (Ismail, 2016). Menempuh pendidikan menjadi hak setiap orang. (Rumsiti, 2022). Sebagaimana dalam pendidikan Islam, manusia memiliki kewenangan bahkan kewajiban dalam menuntut ilmu. Dalam mengelola pendidikan, pelaksana lebih memiliki wewenang untuk mengelolanya. Sejak lahir, Islam sangat mengedepankan kebebasan kepada setiap orang. Tidak ada perbedaan hak antar manusia. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama. (Romlah, 2018).

Demokratisasi dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam adalah satu dari sekian cara untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia khususnya. Para penerus bangsa memerlukan pendidikan yang demokratis, yang dirasa cocok dan nyaman untuk memperoleh pengetahuan dan adanya pemerataan di segala komponen masyarakat serta adanya kualitas dalam pendidikan sehingga ada kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat di era sekarang ini.

Demokrasi dapat dilandasi dengan “musyawarah” yang tidak lain merupakan hal yang diajarkan dalam Islam. Bukti dari pernyataan tersebut terdapat pada surah Ali-Imran ayat 159 yang di dalamnya berisi perintah untuk memutuskan sesuatu dengan kesepakatan bersama. Artinya seluruh orang yang terlibat memiliki hak untuk menyalurkan

pandangan dan menerima perbedaan yang ada dengan hati yang lapang. (Wijaya, 2020).

Besar kemungkinan pendidikan yang sifatnya formal belum mampu menyentuh hakikat dari pendidikan Islam itu sendiri. Pendidikan hanya menjadi ladang penghasilan untuk konsumsi pribadi dan kepentingan pribadi semata. Dalam hal ini, pendidikan Islam bisa menjadi wadah untuk dijadikan sebagai praktek kritis rakyat dalam rangka membebaskan masyarakat bawah dari ketertinggalan, kebodohan, kemiskinan dan ketidakberdayaannya di lapisan masyarakat. (Fathorrahman, 2020).

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi dokumen. Dimana dalam studi kepustakaan peneliti mencari informasi dari buku-buku teks dan hasil penelitian orang lain sebagaimana pendapat M Iqbal (2002: 29) studi kepustakaan merujuk pada teori-teori yang sah dan dapat dijumpai atau dicari dalam dokumen berbentuk buku-buku teks ataupun hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, baik yang sudah dipublikasikan ataupun belum. Peneliti dapat meneliti dengan mencari beberapa teori yang memiliki hubungan dengan penelitian ini sebagai bentuk rujukan dalam penelitian serta digunakan sebagai analisis masalah. Studi kepustakaan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh teori-teori dasar yang merujuk pada buku para ahli yang memiliki hubungan dengan demokrasi.

Sedangkan dalam studi dokumen, peneliti dimaksudkan melakukan penelusuran data histori subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sebagaimana pendapat Sugiyono pengertian Studi dokumentasi adalah suatu cara/teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen dengan maksud menemukan data atau informasi yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Demokrasi memiliki dua asal kata yang berasal dari Yunani yakni “demos” artinya rakyat atau penduduk dalam suatu tempat dan “kratein” artinya pemerintahan. (Rahayu, 2017). Dari dua kata tersebut muncul istilah yakni pemerintahan ada di tangan rakyat. (Fahmi, 2016). Demokrasi adalah dimana negara berada pada keadaan sistem pemerintahannya berada pada tangan rakyat, kekuasaan tertinggi di pegang oleh rakyat, atas keputusan bersama rakyat dan pemerintahan dan kekuasaan oleh rakyat. (Fahmi, 2016).

Menurut Henry B. Mayo dalam (Usri, 2019) menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan akan adanya kebijakan yang ditentukan oleh petinggi dan diawasi serta

disetujui oleh rakyat. Demokrasi merupakan suatu sudut pandang yang mengkhhususkan pada aspek kesetaraan akan kewajiban dan hak serta perlakuan atas setiap orang. (Lestari, 2022). Secara paten kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. (Sihono, 2011). Tidak ada paksaan terhadap sesuatu hal, adanya kebebasan dalam berpendapat dan kebebasan dalam berkelompok.

Menurut Mastuhu, demokrasi memberikan peluang yang sama pada setiap orang, bukan semata-mata untuk memperbaiki permasalahan pembangunan atau pendidikan. (Qiso & Nafisah, 2021). Demokrasi akan terlaksana dengan baik jika masyarakat sadar akan pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di lain sisi, pemerintah juga sadar akan tanggung jawabnya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung terjadinya demokrasi.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan suatu gagasan yang melandasi adanya kebebasan setiap orang untuk berpendapat. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyalurkan pendapatnya.

Pendidikan asal katanya yakni dari didik dimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna menjaga, memberikan latihan, mengenai adab dan kecerdasan sebuah pikiran. Sedangkan pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebuah proses dalam mengubah suatu sikap dan tata laku baik itu pribadi seseorang ataupun kelompok orang dalam hal ini yakni usaha untuk mendewasakan seorang manusia melalui upaya baik dalam bentuk pengajaran atau pelatihan. (<https://kbbi.web.id/didik> diakses pada Desember 2022). Dari beberapa pemaparan diatas didapat pengertian bahwa pendidikan adalah suatu proses mengubah sesuatu hal dalam diri manusia baik sikap dan tingkah laku seseorang ataupun kelompok orang dengan tujuan mendewasakan seorang manusia tersebut dengan upaya-upaya baik pengajaran ataupun pelatihan.

Bahasa Inggris memiliki pengertian untuk kata pendidikan sendiri. Asal kata pendidik yakni "*education*" yang dapat diartikan sebagai memberikan peningkatan, dan mengembangkan. Maknanya pendidikan memiliki arti suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan sebagai sarana memperoleh sebuah ilmu pengetahuan. (Mawarti, 2017). Yunani juga memiliki terjemahan sendiri terhadap kata pendidikan. Asal kata pendidikan yakni "*pedagogic*" yang dapat di terjemahkan sebagai sebuah ilmu menuntun anak. Sedangkan dalam bahasa Romawi, pendidikan memiliki asal kata "*educare*" yang dapat di pahami sebagai mengeluarkan dan menuntun, implementasi kemampuan seorang anak yang secara lahiriah sudah diberikan sejak lahir di dunia. Dalam bahasa Jerman, pendidikan berasal dari kata "*Erziehung*" yang berarti menumbuhkan kembali kemampuan ada dalam diri atau dalam kata lain merealisasikan potensi seorang anak. Kemudian dalam bahasa Jawa,

pendidikan berarti “*panggulawentah*” yang dapat diartikan sebagai suatu bentuk upaya dengan tujuan mengubah tingkah laku anak menjadi lebih baik. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai hal dilakukan sebagai bentuk upaya memajukan budi pekerti, pikiran (sudut pandang), serta jasmani anak, dengan tujuan kesempurnaan sebuah kehidupan yaitu hidup dan memberikan hidup kepada anak yang sejalan dengan alam sekitarnya dan masyarakatnya. (Nurkholis, 2013).

Pendidikan adalah serangkaian pembelajaran yang ditujukan untuk siswa supaya mampu mengerti, paham, serta dapat menciptakan manusia yang kritis dalam berfikir sehingga memperoleh kehidupan yang semakin baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah kesadaran dan perencanaan dalam konteks menciptakan sebuah keadaan dan proses belajar-mengajar dengan tujuan peserta didik dapat dengan aktif menggali potensi yang ada dalam dirinya sehingga memiliki sebuah kekuatan keagamaan, pengendalian terhadap hal tersebut dan hal-hal yang bisa memperkokoh kedamaian dalam beragama. (Dwianti et al., 2021).

Dalam Islam pendidikan memiliki beberapa istilah yaitu *at-tarbiyah*, *at-talim*, dan *at-ta'dib*. Dari ketiganya memiliki arti yang berbeda-beda. *At-tarbiyah* berarti memelihara, mendidik, dan mengasuh. *At-ta'lim* berarti proses transfer ilmu pengetahuan maksudnya adalah memberi atau mengajar sesuatu yang disebut ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Kemudian *at-ta'dib* berarti sopan santun atau beradab, maksudnya adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu harus memiliki sopan santun supaya ilmu yang sedang dipelajari dapat memberikan manfaat dan juga mendapatkan ridha dari Allah swt. Ayat suci al-Qur'an yang menjelaskan tentang pendidikan khususnya pada kata *at-tarbiyah* terdapat dalam Q.S Al-Isra' ayat 24.

Dalam Ayat tersebut dijelaskan kepada pembacanya bahwa kata *at-tarbiyah* memiliki makna yang kompleks di banding istilah pendidikan lainnya karena dalam bahasa Indonesia *at-tarbiyah* berarti mendidik, mengajar, mengasuh dan sebagainya. (Has, 2014). Pendidikan tidak sekedar hanya diartikan mengajar namun dapat diartikan lebih luas lagi karena sosok guru tidak dapat digantikan oleh apapun bahkan teknologi canggih sekalipun tidak dapat menggeser kedudukan seorang guru. Guru tidak sekedar mengajar namun banyak hal yang harus di perankan oleh seorang guru. Guru menjelaskan sebuah materi juga memberikan contoh nyata kepada anak muridnya serta memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah upaya yang ditempuh dengan maksud menuntun anak sejak dilahirkan dengan tujuan mencapai kedewasaan dari segi jasmani

maupun segi rohani sehingga dapat memberikan manfaat di kehidupan bermasyarakatnya.

Demokratisasi pendidikan merupakan sudut pandang yang mengerucut pada persamaan atas kewajiban, hak dan perlakuan kepada peserta didik dari tenaga pendidik. (Fathorrahman, 2020). Pada intinya, demokrasi pendidikan menginginkan peserta didik dapat mengembangkan kebebasannya melalui ketersediaan pendidikan yang ada. Pengembangan baik dari segi pengetahuan, sikap dan keterampilannya. Pada prinsipnya demokrasi pendidikan bertujuan menghasilkan manusia yang kritis. Karena dari situlah lahir manusia-manusia yang dapat memecahkan masalah baik pribadi maupun masalah sosial. (Suryadi, 2020)

Dalam demokrasi pendidikan, peserta didik memiliki hak untuk terlibat dalam seluruh proses pendidikan. Peserta didik tidak hanya dibiarkan begitu saja untuk belajar, namun harus ada suatu sistem yang menuntut mereka untuk aktif serta ada bimbingan untuk mempelajari sesuatu. Dalam perihal ini, guru diposisikan sebagai pembimbing yang memiliki kewajiban untuk menjalin komunikasi dan memberikan kebebasan kepada peserta didiknya untuk dapat memperoleh pengetahuan dengan harapan peserta didik tersebut dapat menjadi pribadi yang memiliki kualitas sehingga terbentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pula. (Purnomo, 2020).

Prinsip-prinsip demokrasi dalam dunia pendidikan mencakup beberapa hal diantaranya yakni setiap warga yang mukim di negara memiliki hak asasi yang sama dalam perihal memperoleh pendidikan, warga negara juga berhak akan kesempatan yang sama dalam perihal memperoleh pendidikan, serta kesempatan yang dimaksud adalah kesempatan di dalam kemampuan warga negara tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui ide dan nilai yang terdapat dalam demokrasi sedikit banyaknya merupakan pengaruh dari kondisi masyarakat itu sendiri. Artinya demokrasi lahir karena sebab adanya latar belakang kehidupan masyarakat.

Peserta didik akan menjadi kritis apabila ada kebebasan yang diberikan sehingga eksplornya terhadap sesuatu semakin meningkat. Pencapaian kritisitas ini dapat dilakukan dengan adanya dialog antar peserta didik dan pendidik dan adanya keterbukaan dalam pembelajaran. (Darmadi, 2018). Pendidikan demokrasi juga tercermin ketika adanya perlakuan yang sama di setiap peserta didik. Tidak memandang anak siapa dan dari keluarga siapa. Setiap peserta didik yang di titipkan di lembaga sekolah memiliki hak dan kewajiban yang sama. (Mutholingah, 2021).

Peserta didik bukan berasal dari lembaga pendidikan. mereka dititipkan ke lembaga sekolah. Oleh sebab itu, ada orang tua yang menitipkannya ke lembaga pendidikan. Karena peserta didik erat

kaitannya dengan orang tuanya juga memiliki hak untuk dilibatkan dalam proses pendidikan anak-anaknya. Orang tua berhak mengetahui perkembangan anak-anaknya di sekolah. Baik itu melalui rapat antara sekolah dan para orang tua atau wali ataupun kegiatan lainnya. (Arifian, 2019). Dalam hal ini juga partisipasi orang tua ataupun wali sangat diperlukann. Dalam penentuan pembuatan keputusan semua pihak harus saling mengetahui dan memberikan ketersetujuannya.

Pengambilan keputusan yang demikian mencerminkan adanya pengambilan keputusan berdasarkan demokrasi. Adanya lingkungan yang terbuka dan bebas. Warga yang ada di sekolah baik peserta didik, pendidik, orang tua, tokoh masyarakat juga memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Oleh kegiatan tersebut semua orang yang terlibat tersebut akan merasa di hargain dalam membuat suatu keputusan sehingga orang-orang yang terlibat itu juga menyadari adanya tanggungjawab atas apa yang sudah disepakati tersebut.

Pada kenyataannya demokrasi banyak dipengaruhi oleh pikiran, sifat dan jenis masyarakat. Karena dari sana tolak ukur dari demokrasi pendidik itu sendiri. Pengembangan demokrasi pendidikan akan mengacu pada realitas suasana dan kondisi masyarakat yang ada. Apabila demokrasi di jalankan sesuai dengan hal tersebut maka perlu diperhatikan dalam menjunjung kedudukan atau posisi manusia harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada sejak dahulu. Adanya kewajiban untuk menghormati dan melindungi setiap hak manusia yang tidak merendahkan dan memiliki aturan yang sesuai. Serta adanya upaya memenuhi setiap warga untuk mendapatkan hak pendidikannya dan pembelajaran formal sesuai dengan kemampuan masing-masing serta disesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa harus merugikan pihak lain. (Fathorrahman, 2020). Demokrasi pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi penerus bagi bangsa yang dapat menjadi pemangku yang baik di negara Indonesia.

Implementasi demokrasi pendidikan dalam pendidikan Islam yakni dengan mewujudkan pendidikan yang berorientasi kepada perwujudan peserta didik menjadi pribadi yang memiliki jiwa integritas yang tinggi, selalu bersyukur di setiap keadaan, menjadi makhluk yang sosial dan menyatu dengan alam serta dapat memahami diri sendiri atau dapat menyatu dengan dirinya sendiri. Peserta didik juga diharapkan menjadi pribadi yang penuh kasing sayang terhadap sesama, bisa menghargai satu sama lain dan dapat befikir serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang sudah tertanam sejak dahulu.

Praktek demokrasi sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian di ketahui dengan kata musyawarah. Ini tampak semakin jelas saat Rasulullah menyelesaikan masalah dalam segi strategi perang dan diplomasi dengan musuh. Beliau senantiasa bersikap aspiratif dan tolerir atas segala perbedaan sudut pandang antar sahabat begitupun musuh.

Walaupun demikian tujuan utamanya yakni terperolehnya kesepakatan bersama, maka Rasulullah SAW mengambil putusan dengan suara yang mendominasi dengan berbagai pertimbangan serta masukan ataupun saran dari para sahabat.

Musyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat atau masyarakat merupakan bukti peraturan dan ketentuan pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. serta kemuliaan akhlaknya. Dari konsep musyawarah tersebut terdapat nilai-nilai demokrasi yakni:

1. Nilai kebebasan
2. Nilai persamaan, dan
3. Nilai penghormatan terhadap kedudukan manusia.

Implementasi demokrasi dalam pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya:

1. Tauhid

Tauhid yakni suatu penegasan atas kepunyaan diri. Dengan adanya tauhid dalam diri seseorang berarti seseorang tersebut secara tegas mengklaim bahwa dirinya sudah terbebas dari kebelungguan atas kebendaan atau kerohanian, ia hanya mengetahui bahwa dirinya ini milik Allah dan segala perbuatannya dilakukan untuk Allah swt.

2. *Syura*

Syura yakni mengambil keputusan secara bersama. Istilah singkatnya yakni musyawarah. Dalam hal mencari kebenaran harus senantiasa diputuskan secara bersama-sama. Al-Qur'an dalam surah Ali Imran Ayat 159 menganjurkan umatnya untuk bermusyawarah. Musyawarah menjadi penting karena hal tersebut merupakan sesuatu yang membawa nilai keterbukaan. Selain keterbukaan, musyawarah juga membawa sebuah nilai tanggung jawab pada masing-masing individu.

3. *Al-adlu*

Al-adlu yakni masyarakat tanpa kelas. Artinya keadilan itu milik bersama. Masing-masing orang berhak memiliki hak dan kesempatan yang sama. Keadilan berlandaskan kebenaran yang ada, tidak mengganggu dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan tampak pada pemberian hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

4. Amar makruf nahi munkar

Amar makruf nahi munkar yakni menyadari akan diri harus memiliki kekuatan dan kualitas baik fisik ataupun mental dengan tujuan dapat mencegah adanya kemungkaran dengan berlandaskan tauhid. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 110 yang menjelaskan bahwa manusia harus sadar akan posisinya sebagai makhluk yang

terbaik. Untuk itu, besar harapan manusia itu dapat menjadi makhluk yang dapat berkehidupan sosial yang baik dan terus membaik.

5. *Tawassuth*

Tawassuth di terjemahkan sebagai prinsip moderasi. Artinya setiap manusia harus memegang prinsip pertengahan dalam segala sikap perbuatannya. Salah satu contoh nyata *tawassuth* ini diterapkan yakni di beberapa lembaga pendidikan Pesantren yang terbilang sudah tua. Dimana di dalam lembaga tersebut tetap teguh mempelajari kitab kuning sekaligus mampu menerapkan sistem pendidikan formal yang teradopsi dari sistem pendidikan Barat. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan bahwa manusia harus berada pada posisi tengah-tengah. Posisi tersebut bukan berarti mencampuradukkan segala unsur namun, memberikan segalanya untuk memiliki posisi tanpa harus menggeser sesuatu yang sudah ada.

6. Kewajiban dan Hak manusia dalam pengembangan ilmu.

Di kalimat diatas jelas bahwa semua manusia memiliki kewajiban dan hak sama atas menuntut ilmu. Di dalam Islam khususnya, tidak ada perbedaan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW yang menyatakan kewajiban menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam. Dalam hadist tersebut jelas Islam sangat mementingkan demokrasi khususnya dalam lingkup pendidikan. (Fathorrahman, 2020).

Kesimpulan

Keeksistensian Pendidikan Islam masih perlu perhatian. Tidak jarang ditemukan lembaga pendidikan di dalamnya juga mencakup peserta didik yang kurang menunjukkan pengetahuan di bidang Islam. Demokratisasi pendidikan dapat dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah yang ada karena demokratisasi pendidikan merupakan sudut pandang yang mengerucut pada persamaan atas kewajiban, hak dan perlakuan kepada peserta didik dari tenaga pendidik. Dalam demokrasi pendidikan, peserta didik memiliki hak untuk terlibat dalam seluruh proses pendidikan. Peserta didik tidak hanya dibiarkan begitu saja untuk belajar, namun harus ada suatu sistem yang menuntut mereka untuk aktif serta ada bimbingan untuk mempelajari sesuatu. Cerminan demokrasi dalam pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya *pertama*, Tauhid, yakni suatu penegasan atas kepunyaan diri. Dengan adanya tauhid dalam diri seseorang berarti seseorang tersebut secara tegas mengklaim bahwa dirinya sudah terbebas dari kebelunggan atas kebendaan atau kerohanian, ia hanya mengetahui bahwa dirinya ini milik Allah dan segala perbuatannya dilakukan untuk Allah swt. *Kedua*, *syura*, yakni mengambil keputusan secara bersama. Istilah singkatnya yakni musyawarah. Dalam hal mencari kebenaran

harus senantiasa diputuskan secara bersama-sama. *Ketiga, Al-adlu*, yakni masyarakat tanpa kelas. Artinya keadilan itu milik bersama. Masing-masing orang berhak memiliki hak dan kesempatan yang sama. *Keempat*, amar makruf nahu mungkar yakni menyadari akan diri harus memiliki kekuatan dan kualitas baik fisik ataupun mental dengan tujuan dapat mencegah adanya kemungkaran dengan berlandaskan tauhid. *Kelima, Tawassuth* atau di terjemahkan sebagai prinsip moderasi. Artinya setiap manusia harus memegang prinsip pertengahan dalam segala sikap perbuatannya. Salah satu contoh nyata *tawassuth* ini diterapkan yakni di beberapa lembaga pendidikan Pesantren yang terbilang sudah tua. Dimana di dalam lembaga tersebut tetap teguh mempelajari kitab kuning sekaligus mampu menerapkan sistem pendidikan formal yang teradopsi dari sistem pendidikan Barat. *Keenam*, kewajiban dan Hak manusia dalam pengembangan ilmu. Di kalimat tersebut jelas bahwa semua manusia memiliki kewajiban dan hak sama atas menuntut ilmu. Di dalam Islam khususnya, tidak ada perbedaan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu.

Daftar Pustaka

- Arifian, F. D. (2019). *Menalar Problem Pendidikan dan Bahasa*. PT Kanisius.
- Darmadi. (2018). *Mendidik Adalah Cinta*. CV Kekata Group.
- Dwianti, I. N., Julianti, R. R., & Rahayu, E. T. (2021). *Pengaruh Media PowerPoint dalam pembelajaran Jarak Jauh Terhadap Aktivitas Kebugaran Jasmani Siswa*. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(4).
- Fahmi, M. (2016). *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Kewarganegaraan*. *Journal of Islamic Education Studies*, 1(1).
- Fathorrahman. (2020). *Demokratisasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam*. *Ilmuna*, 2(1).
- Has, M. H. (2014). *Dinamika Karakteristik Pendidikan Perspektif Al-Qur'an. Al-Ta'dib*, 7(2).
- Ismail, Moh. (2016). *Demokratisasi Pendidikan Islam dalam Pandangan KH. Abdul Wahid Hasyim*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(2).
- Lestari, A. (2022). *Demokrasi Pendidikan Islam: Konsep dan Implementasinya*. *Kajian Pendidikan Dan Ilmu Keislaman*, 8(1).

- Mawarti, S. (2017). *Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi dalam Pembelajaran Agama Islam*. Media Komunikasi Umat Beragama, 9(1).
- Mutholingah. (2021). *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Budaya Nirkekerasan di Perguruan Tinggi Umum*. Insan Cendekia Mandiri.
- Nurkholis. (2013). *Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi*. Jurnal Kependidikan, 1(1).
- Purnomo, H. (2020). *Pendidikan Islam*. Tangga Ilmu.
- Qiso, A. A., & Nafisah, A. (2021). *Perbandingan Pemikiran Demokrasi Pendidikan Paulo Freire dan Muhammad Athiyah Al-Abrasyi*. Studi-Studi Keislaman, 2(2).
- Rahayu, A. S. (2017). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. PT Bumi Aksara.
- Romlah, S. (2018). *Demokrasi Pendidikan Islam*. Jurnal Studi Islam, 13(2).
- Rosyad, A. M., & Ma'arif, M. A. (2020). *Paradigma Pendidikan Demokrasi dan Pendidikan Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Islam, 3(1).
- Rumsiti, N. (2022). *Demokratisasi Pendidikan Islam dalam Kearifan Lokal Dayak Hapakat Basara dan Korelasinya dengan Al-Qur'an*. Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam, 8(1).
- Sihono, T. (2011). *Upaya Menuju Demokratisasi Pendidikan*. Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan, 8(1).
- Suryadi, A. (2020). *Pemikiran Pendidikan Islam Fazlur Rahman*. CV Jejak.
- Usri. (2019). *Pendidikan Islam dan Demokrasi*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan, 1(2).
- Wijaya, M. M. (2020). *Relevansi Pendidikan Islam Demokratis dalam Surat Ali Imran 159*. Pendidikan Agama Islam, 8(2).
- Yu'timaalahuyatazaka. (2018). *Konsep Demokrasi Nurcholish Madjid dan Implementasinya dalam Filsafat Pendidikan Islam*. At-Tajdid, 2(1).